# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan isu kebangkitan Islam (the revival of Islam), maka berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakekat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu negara Islam dan sistem politik Islam mendapaat sorotan tajam.[1] Setelah berakhirnya sistem kekhalifahan di Turki (1924), dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara Islam.[2]

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa-masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks dengan munculnya pemikiran-pemikiran dan perdebatan-perdebatan dari kalangan Islam sendiri tentang Islam dan negara.

---

[1]Drs. Muhammad Azhar, M.A., *"Filsafat Politik Islam: Perbandingan antara Islam dan Barat"*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

[2]Dr. Muhammad Amien Rais, *"Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta"*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 36.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi pemikir Islam memang terdapat suatu kesulitan dalam menentukan bentuk negara sesuai dengan kehendak ajaran Islam. Tidak ada *nash* yang tegas yang dapat menentukan bentuk negara dalam pandangan Islam. Itulah sebabnya kita dapat menyaksikan dalam sejarah politik Islam bentuk negara tidak satu macam, dan karena itu pulalah para pemikir teori kenegaraan dalam Islam tidak bersatu pendapat dalam bentuk negara.[4] Yang tentu saja pangkal perbedaan ini, tidak saja bersumber dari keberagaman dalam penafsiran atas teks-wahyu yang a-historis, tetapi juga terkait dengan keberagaman tafsiran terhadap realitas sosial-historis atas eksistensi duniawi dari sistem kenegaraan Islam (khilafah) itu sendiri.

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumber wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena kepercayaan mayoritas umat

---

[4]Ahmad Tafsir, "Negara Sekuler yang mementingkan Agama", Kata Pengantar dalam buku *"Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam"*, Ali Abdur Raziq, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan utusan Tuhan yang terakhir.[5]

Penegasan terhadap finalitas Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. disebutkan dalam al-Qur'an yang melukiskan Muhammad sebgai Nabi penutup:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi..."(QS 33:40).[6]

Sementara itu, sampai wafatnya beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa yang harus mengganti kedudukannya sebagai pemimpin politik umat Islam. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya. Dalam al-Qur'an ataupun Hadits Nabi tidak terdapat petunjuk eksplisit tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sekaligus pemimpin spiritual sepeninggal beliau. Rasulullah hanya memberi petunjuk

---

[5]Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, hlm. 21.

[6]Departemen Agama RI., *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 674.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sifatnya sangat umum dan abstrak agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, dengan tanpa adanya pola baku tentang bagaimana mekanisme musyawarah itu harus diselenggarakan.[7]

Kenyataan tersebut mengandung arti, baik al-Qur'an maupun sunnah Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan bentuk dan sisten musyawarah serta mekanismenya sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan mereka. Yang penting dalam pelaksanaan musyawarah itu dan pengambilan keputusannya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu kebebasan, persamaan dan keadilan.[8]

Itulah sebabnya yang menjadi salah satu sebab utama mengapa dalam proses terpilihnya empat *al-Khalifah al-Rasyidin* itu meskipun sama-sama ditentukan melalui

---

[7]Lihat Abu An-Na'im, *"Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam"*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 152-153.

[8]S. Pulungan, *"Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*, (Jakaarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah, tetapi pola dan mekanisme musyawarah yang ditempuhnya beraneka ragam.

Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar diangkat sebagai pengganti Rasul (*Khalifah Rasulillah*) [9] Pengangkatan beliau merupakan hasil kesepakatan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor dalam musyawarah. Meskipun keadaannya mendesak, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang lain tidak ikut serta dalam perundingan itu.

Umar ibn Khattab diangkat melalui petunjuk oleh pendahulunya dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka. Abu Bakar secara pribadi memutuskan bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya, setelah mengadakan musyawarah tertutup dengan beberapa shahabat senior, dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ia juga memperkenalkan istilah *Amir al-Mu'minin* (komando orang-orang beriman).[10]

---

[9]Drs. Badri Yatim, M.A., *"Sejarah Peradaban Islam"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 35.

[10]*I b i d.*, hlm. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utsman ibn Affan menjadi khalifah melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka oleh semacam dewan formatur, *majlis syura* yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk pendahulunya.[11] Penunjukan dewan formatur ini tidaklah berdasarkan perwakilan unsur, tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi. Artinya walaupun dalam musyawarah dewan formatur tersebut diperkenankan berunding namun demikian anggota-anggotanya tidak berhak beda pendapat.[12]

Selain persoalan ketiadaan pola baku mekanisme pemilihan dan pergantian seorang khalifah, di masa *Khulafa al-Rayidin* ini juga tidak terdapat petunjuk tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara. Mereka berempat secara kebetulan, tegasnya diakhiri dengan suatu insiden, meninggal dunia atau terbunuh. Abu Bakar meninggal dunia setelah hampir dua setengah tahun lamanya memerintah. Sementara itu Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib,

---

[11]Sa'id Hawwa, *"Al-Islam: Sistem Bermasyarakat dan Bernegara"*, (Jakarta: Al-Islahi Press, t.t.), hlm. 156-157.

[12]Lihat Drs. Abdul Azis Thaba, M.A., *"Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir kekhalifaahannya karena tari terbunuh, setelah masing-masing berhail memerintah selam sepuluh setengah tahun, dua belas tahun serta sedikit kurang dari lima tahun.

Dalam perkembangan umat Islam selanjutnya, simbol dan istilah sistem khalifah tersebut tetap digunakan. tapi beda dengan masa Khulafah al-Rasyidin, sistem khilafah berikutnya ini mengalami probahan subtansial dengan tampilnya Mu'awiyah ibn Abi Shofyan, yang kemudian terkenal sebagai pendiri Dinasti Umayyah, sejak tahun 661M Perobahan yang paling mencolok dalam sistem khilafah pasca khulafah al-rasyidin ini adalah mekanisme sukses kepemimpinan kepala negara yang menggunakan pola pewarisan pada keturunan dengan tanpa adanya sistem musyawarah.

Terlepas dari kenyataan historis-faktual maupun doktrinal-konseptu. Abul al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati, yang merupakan dua tokoh besar Islam dengan latar belakang kultur yang berbeda. Mempunyai pandangan yang sama terhadap persoalan sistem pemerintahan islam. Bahwa secara tegas kedusnya mewajibkan umat Islam untuk membentuk sebuah pemerintahan berdasarkan Islam.

Dalam hal ini antara Al-Maududi dan Ali-Syari'at, berbeda dalam penggunaan istilah untuk menyebutkan sebuah pemerintahan Islam. Bagi Maududi, penggunaan istilah khilafah adalah doktrin yang disebutkan didalam al-Qur'an. Bahwa khilafah yang sh dan benar, bukanlah pada perorangs,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga atau kelas tertentu, akan tetapi terletak pada komunitas secara keseluruhan (kolektif).

Sedangkan Syari'ati, menggunakan istilah dalam menyebut pemerintahan Islam adlah Ummah dan Imamah, berdasarkan pada logika, walaupun pada satu sisi istilah tersebut merupakan prinsip akidah Islamiyah dikalangan mazhab syi'ah. Tegasnya, alasan Syari'ati bahwa munculnya problem-problem Ummah, merupakan keharusan adanya Imamah.

Berangkat dari perbedaan awal tentang penggunaan istilah pemerintahan Islam, yang tentu saja sarat pula dengan persamaan dan perbedaan menyangkut kewenangan khalifah serta suksesinya. Tentu saja, diperlukan dialog kritis dikalangan umat Islam dalam meformulasikan bagi pengembangan pemikiran politik kenegaraan dalam pandangan Islam.

## B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang dipaparkan didepan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut ::

1. Bagaimana definisi khilafah sistem politik Islam ?
2. Bagaimana pandangan al-Maududi dan Ali Syari'ati tentang sistem khilafah ?
3. Bagaimana pandangan politik al-Maududi dan Ali Syari'ati ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaimana kewenangan khalifah sebagai suatu pemerintahan Islam ?
5. Bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi ?
6. Bagaiman mekanisme suksesi dalam sistem khilafah menurut al-Maududi dan Ali Syari'ati ?

## C. Pembatasan Masalah

Oleh karena masalah yang timbul dari pembahasan ini dapat menjadi angat kompleks dan luas sekali, maka masalah tersebut perlu dibatasi dengan pembatasan :

1. Khilafah dalam konsepsi Islam.
2. Khilafah dalam pandangan al-Maududi dan Ali Syari'ati.
3. Kewenangan khalifah dan mekanisme suksesi dalam sistem khilafah.

## D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, maka rumusan maalahnya dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pengertian khilafah dalam konsepsi ajaran Islam?
2. Bagaimana pengertian khilafah dalam Islam menurut knsepsi abul al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati ?
3. Bagaimana kewenangan khalifah dan mekanisme suksesi dalam pandangan abul al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Studi

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan studi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan konsep khilafah menurut abul al-'Ala al-Maududi dan Ali Syari'ati.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep abul al'ala al-Maududi dan Ali Syari'ati dalam praktek ketatanegaraan dalam Islam.

## F. Kegunaan Studi

Hasil dari studi ini diharapkan bernilai dan bermakna minimal untuk perihal :

1. Sebagai kajian ilmiyah khususnya bagi penulis pribadi, bagi mahasiswa fakultas Syari'ah dan bagi siapa saja yang menginginkan untuk melakukan studi lebih lanjut.
2. Dapat diperoleh perbandingan yang kritis antara konsep Abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya pemerintahan yang Islami yang sesuai dengan kehendak Islam.

## G. Data-Data yang Dihimpun

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Konsep khilafah menurut abu al-Maududi dan Ali Syari'ati.
2. Sejarah hidup abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori tentang sistem pemerintahan dalam Islam.

## H. Sumber Data

Dengan berdasrkan pada data-data yang akan diperlukan dalam penelitian ini, maka data tersebut akan dihimpun antara lain :

1. Abu al-A'la al-Maududi, *"Khilafah dan Kerajaan"*.
2. Ali Syari'ati, "Ummah dan Imamah"
3. Salim Ali Bahnasawi, *"Wawasan Sistem Politik Islam"*
4. Taqiyuddin an-Nabhani, *"Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin dan Sejarah"*.
5. Azyumardi Azra, *"Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme"*.
6. M. Yusuf Musa, *"politik Negara Dalam Islam"*.
7. Abdullah Ahmad an-Na'im, *"Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasioanl"*.
8. Abdul Wahab Effendi, *"Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam"*.
9. J. Suyuthi Pulungan, *"Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*.
10. Dan lain-lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

## I. Teknik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian maalah ini adalh riset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka (*library research*). Adapun teknik penggalian data tersebut dengan cara menelaah dan menganalisis sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan analisis sumber-sumber itu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumya.

**J. Metode Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut akan dianalisis, dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. **Editing** : yaitu pengolahan data-data yang diperoleh dari sumber pustaka.
2. **Pengorganisasian Data-data** : menyusun dan mensistematika data-data yang diperoleh, sesuai denga perumusan masalah.
3. **Penemuan Hasil** : analisis terhadap hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan beberapa kaidah, teori dalil sehingga diperoleh simpulan-simpulan dari perumusan masalah.

Sedangkan metode untuk menganalisis data menggunakan:

1. **Induksi** : metode ini digunakan untuk mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka (*library research*) yaitu konsep khilafah menurut abu al-A'la al-Maududidan Ali Syari'ati. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yakni pelaksanaan konsepsi khilafah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Deduksi** : metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan umum, berupa konsepsi khilafah dan kemudian disimpulakan kenyataan dari hasil riset pustaka yang bersifat khusus, yakni konsep khilafah menurut Abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati.
3. **Komperarif** : metode ini digunakan untuk membandingkan konsep khilafah menurut Abu al-A'la al-Maududi dan Ali Syari'ati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id